



WALIKOTA PASURUAN  
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN WALIKOTA PASURUAN  
NOMOR 69 TAHUN 2021

TENTANG

PEDOMAN PENANGANAN PELAPORAN PENGADUAN  
(*WHISTLEBLOWING SYSTEM*) DUGAAN TINDAK PIDANA KORUPSI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PASURUAN,

- Menimbang :
- a. bahwa pengaduan dari masyarakat atas dugaan terjadinya tindak pidana korupsi merupakan salah satu bentuk peran serta masyarakat dalam pengawasan dan perlu mendapatkan tanggapan secara cepat, tepat, dan dapat dipertanggungjawabkan;
  - b. bahwa sebagai wujud Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi, Bersih dan Melayani, perlu mendorong peran serta pegawai di lingkungan Pemerintah Kota Pasuruan dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pedoman Penanganan Pelaporan Pengaduan (*Whistleblowing System*) Dugaan Tindak Pidana Korupsi;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nr 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
  2. Undang-Undang ...

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4899);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pasuruan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3241);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3995);
9. Peraturan ...

9. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor Per/05/M.PAN/4/2009 tentang Pedoman Umum Penanganan Pengaduan Masyarakat Bagi Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1813) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 671);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN PENANGANAN PELAPORAN PENGADUAN (*WHISTLEBLOWING SYSTEM*) DUGAAN TINDAK PIDANA KORUPSI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Pasuruan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Pasuruan.
3. Walikota adalah Walikota Pasuruan.
4. Inspektorat adalah Inspektorat Kota Pasuruan.
5. Tindak ...

5. Tindak Pidana Korupsi adalah tindakan setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.
6. Pelapor Pengaduan (*Whistleblower*) yang selanjutnya disebut Pelapor adalah seseorang yang mengadukan perbuatan dugaan Tindak Pidana Korupsi yang terjadi di dalam organisasi tempatnya bekerja atau pihak terkait lainnya yang memiliki akses informasi yang memadai atas terjadinya indikasi Tindak Pidana Korupsi.
7. *Whistleblowing System* adalah mekanisme penyampaian pengaduan dugaan Tindak Pidana Korupsi yang telah terjadi yang melibatkan pegawai dan orang lain yang berkaitan dengan dugaan Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan di dalam organisasi tempatnya bekerja.
8. Pelaporan adalah informasi yang disampaikan oleh Pelapor terkait perbuatan yang berindikasi Tindak Pidana Korupsi dan dilengkapi dengan Bukti Permulaan.
9. Saluran Pengaduan adalah sarana yang digunakan untuk menyampaikan pengaduan.
10. Bukti Permulaan adalah data, dokumen, gambar, dan/atau rekaman yang mendukung/ menjelaskan adanya Tindak Pidana Korupsi.

## BAB II

### PENANGANAN PELAPORAN PENGADUAN

#### Pasal 2

- (1) Setiap orang yang melihat atau mengetahui adanya dugaan Tindak Pidana Korupsi yang merugikan keuangan Negara/Daerah atau perekonomian negara, wajib melaporkan kepada Tim Penerima Pengaduan.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus disertai dengan Bukti Permulaan.

### Pasal 3

- (1) Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, merupakan pengaduan yang dapat disampaikan secara langsung maupun tidak langsung.
- (2) Pelaporan secara langsung dapat dilakukan melalui Saluran Pengaduan yang berupa *help desk* yang harus disediakan oleh Inspektorat.
- (3) Pelaporan secara tidak langsung dapat dilakukan melalui Saluran Pengaduan berupa kotak pengaduan dan *website*, yang harus disediakan oleh Inspektorat.
- (4) Perangkat daerah harus memublikasikan Saluran Pengaduan yang dimiliki Inspektorat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), paling kurang pada papan pengumuman resmi kantor secara terus-menerus dan media massa elektronik secara berkala 2 (dua) kali dalam setahun.

### Pasal 4

- (1) Tim Penerima Pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), berkedudukan di Inspektorat.
- (2) Susunan Tim Penerima Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
  - a. Penanggungjawab : Inspektur
  - b. Wakil Penanggungjawab /  
Pengendali Mutu : Inspektur Pembantu
  - c. Pengendali Teknis : Auditor Ahli
  - d. Ketua Tim : Auditor Ahli
  - e. Anggota : Auditor Ahli  
dan/atau Auditor  
Terampil dan/atau  
Auditor Mahir  
dan/atau Auditor  
Penyelia, pegawai  
dan/atau tenaga  
ahli yang ditunjuk
- (3) Tim Penerima Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertugas menerima dan menindaklanjuti pengaduan yang disampaikan oleh Pelapor serta berkewajiban menjamin kerahasiaan identitas Pelapor.

### Pasal 5

Dalam hal adanya Pelaporan, Tim Penerima Pengaduan wajib:

- a. menerima laporan adanya dugaan Tindak Pidana Korupsi baik secara langsung maupun tidak langsung;
- b. mencatat dan mengadministrasikan laporan pengaduan;
- c. menganalisis dan menelaah laporan pengaduan untuk menentukan tindak lanjut;
- d. melakukan audit investigatif;
- e. memberikan rekomendasi kepada Walikota; dan
- f. membuat laporan berkala tentang penanganan pengaduan.

### Pasal 6

Rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e, dapat berupa:

- a. penjatuhan hukuman disiplin;
- b. pengembalian kerugian Negara/Daerah;
- c. penyampaian hasil pemeriksaan kepada Aparat Penegak Hukum; dan
- d. penyampaian hasil pemeriksaan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi.

### Pasal 7

- (1) Rekomendasi berupa penyampaian hasil pemeriksaan kepada Aparat Penegak Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, dapat dilakukan dalam hal hasil pemeriksaan pelanggaran dengan dugaan merugikan keuangan negara atau perekonomian negara paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (2) Rekomendasi berupa penyampaian hasil pemeriksaan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d, dapat dilakukan dalam hal hasil pemeriksaan pelanggaran dengan dugaan merugikan keuangan negara atau perekonomian negara paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (3) Penyampaian hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilakukan setelah mendapat persetujuan Walikota.

Pasal 8 ...

#### Pasal 8

- (1) Tim Penerima Pengaduan wajib melindungi dan menjaga kerahasiaan identitas Pelapor, serta memberikan perlakuan yang wajar.
- (2) Tim Penerima Pengaduan dapat mengungkapkan identitas Pelapor pada persidangan di pengadilan.
- (3) Tim Penerima Pengaduan dapat melaporkan kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) apabila Pelapor mengalami ancaman keselamatan jiwa.
- (4) Walikota memberikan sanksi kepada pejabat yang terbukti menyalahgunakan jabatan/wewenang terhadap Pelapor atas Pelaporan dugaan Tindak Pidana Korupsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Tim Penerima Pengaduan akan merekomendasikan pemulihan nama baik bagi terlapor sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, bila tidak terbukti melakukan pelanggaran.

#### Pasal 9

Publikasi hasil penanganan laporan pengaduan dugaan Tindak Pidana Korupsi merupakan kewenangan Walikota.

#### Pasal 10

Dalam hal Pelapor meminta penjelasan mengenai perkembangan tindak lanjut atas laporan yang disampaikan secara tertulis, Tim Penerima Pengaduan harus memberi penjelasan mengenai hal dimaksud kepada Pelapor.

#### Pasal 11

Pelapor yang telah berjasa dalam usaha membantu upaya pencegahan dan/atau pemberantasan Tindak Pidana Korupsi diberikan penghargaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 12

Ketentuan lebih lanjut mengenai Pedoman Penanganan Pelaporan Pengaduan (*Whistleblowing System*) Dugaan Tindak Pidana Korupsi tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB III  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pasuruan.

Ditetapkan di Pasuruan  
pada tanggal 27 Desember 2021.

WALIKOTA PASURUAN,



SAIFULLAH YUSUF

Diundangkan di Pasuruan  
pada tanggal 27 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH KOTA PASURUAN,



RUDIYANTO

BERITA DAERAH KOTA PASURUAN TAHUN 2021 NOMOR 69



LAMPIRAN  
PERATURAN WALIKOTA PASURUAN  
NOMOR 63 TAHUN 2021  
TENTANG  
PEDOMAN PENANGANAN  
PELAPORAN PENGADUAN  
(*WHISTLEBLOWING SYSTEM*)  
DUGAAN TINDAK PIDANA KORUPSI

PEDOMAN PENANGANAN PELAPORAN PENGADUAN  
(*WHISTLEBLOWING SYSTEM*) DUGAAN TINDAK PIDANA KORUPSI

BAB I  
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pelaporan tentang indikasi Tindak Pidana Korupsi merupakan salah satu bentuk peran serta masyarakat dalam pengawasan, sehingga perlu mendapatkan tanggapan cepat, tepat dan dapat dipertanggungjawabkan.

Sesuai Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, antara lain menetapkan Program Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) yang mewajibkan penerapan sistem penanganan pengaduan (*Whistleblowing System*). Sistem ini memberikan kesempatan kepada masyarakat/pegawai Pemerintah Daerah yang mengetahui atau memiliki informasi/bukti-bukti tentang perbuatan Tindak Pidana Korupsi pejabat dan/atau pegawai di lingkungan kerjanya, untuk mengungkapkan penyimpangan tersebut tanpa merasa khawatir kerahasiaannya diketahui oleh orang lain.

Penanganan Pelaporan yang berindikasi Tindak Pidana Korupsi merupakan bagian dari tugas pengawasan oleh Inspektorat sebagaimana diatur di dalam Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 3 Tahun 2021 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Inspektorat Kota Pasuruan yang mengamanatkan kepada Inspektorat untuk melaksanakan pengawasan dan penelitian mengenai kebenaran laporan atau pengaduan tentang hambatan, penyimpangan atau penyalahgunaan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah.

Berdasarkan hal tersebut di atas perlu disusun Pedoman Penanganan Pelaporan Pengaduan (*Whistleblowing System*) Dugaan Tindak Pidana Korupsi sebagai acuan pelaksanaan di dalam penanganan pengaduan dugaan Tindak Pidana Korupsi di lingkungan Pemerintah Daerah.

## B. Maksud dan Tujuan

### 1. Maksud

Pedoman Penanganan Pelaporan Pengaduan (*Whistleblowing System*) Dugaan Tindak Pidana Korupsi, dimaksudkan sebagai:

- a. Acuan dalam menangani pengaduan yang diduga Tindak Pidana Korupsi di lingkungan Pemerintah Daerah.
- b. Sebagai acuan bagi masyarakat/pegawai yang mengetahui atau memiliki informasi dan bukti-bukti tentang suatu penyimpangan yang diduga Tindak Pidana Korupsi untuk melaporkan dugaan penyimpangan di lingkungan Pemerintah Daerah kepada Tim Penerima Pengaduan.
- c. Sebagai acuan didalam memberikan perlindungan kepada Pelapor (*whistleblower*).

### 2. Tujuan

Pedoman Penanganan Pelaporan Pengaduan (*Whistleblowing System*) Dugaan Tindak Pidana Korupsi, dimaksudkan sebagai :

- a. Meningkatkan upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi di lingkungan Pemerintah Daerah.
- b. Mendorong pegawai di lingkungan Pemerintah Daerah yang memiliki informasi dan bukti-bukti tentang dugaan perbuatan Tindak Pidana Korupsi untuk melaporkannya.
- c. Melindungi Pelapor dari rasa tidak aman terkait dengan dugaan Tindak Pidana Korupsi yang dilaporkannya.
- d. Menumbuhkan persepsi masyarakat/pegawai di lingkungan Pemerintah Daerah bahwa apabila melakukan penyimpangan/kecurangan, akan semakin besar peluangnya untuk terdeteksi dan dilaporkan.

## C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup penanganan pengaduan yang berindikasi Tindak Pidana Korupsi di lingkungan Pemerintah Daerah, meliputi:

1. Kebijakan tentang penanganan pengaduan (*whistleblowing*).
2. Penanganan pengaduan dan investigasi terhadap indikasi Tindak Pidana Korupsi.
3. Perlindungan dan penghargaan Pelapor.
4. Pemberian sanksi dan pemulihan nama baik.
5. Pelaporan dan pemantauan.

## D. Pengertian

Dalam Pedoman ini yang dimaksud dengan:

1. *Whistleblowing System* adalah mekanisme penyampaian pengaduan dugaan Tindak Pidana Korupsi yang terjadi yang melibatkan pegawai dan orang lain yang berkaitan dengan dugaan Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan di dalam organisasi tempatnya bekerja.

2. Pejabat yang berwenang menjatuhkan hukuman disiplin adalah pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
3. Audit investigasi merupakan sebuah kegiatan sistematis dan terukur untuk mengungkap kecurangan sejak diketahui, atau diindikasinya sebuah peristiwa/kejadian/transaksi yang dapat memberikan cukup keyakinan, serta dapat digunakan sebagai bukti yang memenuhi pemastian suatu kebenaran dalam menjelaskan kejadian yang telah diasumsikan sebelumnya dalam rangka mencapai keadilan.
4. Bukti Audit adalah segala informasi yang mendukung data yang disajikan dalam laporan keuangan, yang terdiri dari data akuntansi dan informasi pendukung lainnya yang dapat digunakan oleh auditor sebagai dasar untuk menyatakan pendapatnya mengenai kewajaran laporan keuangan tersebut.
5. Evaluasi Bukti adalah kegiatan auditor dalam mempelajari, memeriksa, menguji, menelaah, dan menginterpretasikan bukti untuk menilai kesesuaian bukti dengan hipotesis serta sebagai landasan perlu tidaknya mengembangkan bukti lebih lanjut.

## BAB II

### KEBIJAKAN PENANGANAN PELAPORAN PENGADUAN (*WHISTLEBLOWING*) DUGAAN TINDAK PIDANA KORUPSI

#### A. Kriteria dan Data Laporan Pelanggaran

Setiap orang yang melihat atau mengetahui, mendengar adanya Tindak Pidana Korupsi wajib melaporkan kepada Tim Penerima Pengaduan, dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Pengaduan yang disampaikan melalui *Whistleblowing System* hanya pengaduan yang mengindikasikan adanya Tindak Pidana Korupsi.
2. Data dan informasi yang disampaikan Pelapor harus memenuhi beberapa hal sebagai berikut:
  - a. Laporan adanya dugaan penyimpangan harus didukung dengan bukti-bukti yang cukup diantaranya:
    - 1) Adanya penyimpangan perbuatan melawan hukum yang dilaporkan.
    - 2) Dimana perbuatan melawan hukum tersebut terjadi.
    - 3) Kapan perbuatan melawan hukum terjadi.
    - 4) Siapa dan pejabat/pegawai yang melakukan penyimpangan perbuatan melawan hukum atau siapa yang terlibat dengan peristiwa melawan hukum.
    - 5) Bagaimana cara perbuatan tersebut terjadi.

- b. Data pengaduan berisi informasi sebagai berikut:
- 1) Data mengenai nama, nomor induk kependudukan (NIK), alamat, dan nomor telepon Pelapor dengan melampirkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan/atau identitas diri lainnya dan apabila pelapornya pegawai di lingkungan Pemerintah Daerah harus melampirkan nama dan satuan kerja/unit kerja tempat bekerja Pelapor, jabatan Pelapor, surat keputusan penempatan tugas Pelapor.
  - 2) Keterangan mengenai dugaan pelaku Tindak Pidana Korupsi antara lain:
    - a) Nama pelaku
    - b) Jabatan pelaku
    - c) Satuan Kerja/Unit Kerja pelaku
    - d) Perbuatan yang terindikasi atau diduga terdapat penyimpangan atau pelanggaran yang mengandung unsur Tindak Pidana Korupsi oleh pelaku.
    - e) Waktu penyimpangan atau pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku.
  - 3) Disertai dengan bukti-bukti yang mendukung atau menjelaskan substansi pengaduan Tindak Pidana Korupsi berupa:
    - a) Data atau dokumen yang relevan.
    - b) Gambar dan atau rekaman

Dalam kondisi tertentu, jika informasi pengaduan yang diperoleh sangat terbatas, tetapi mempunyai keyakinan berdasarkan pertimbangan profesional aparatur pengawas/auditor, bahwa informasi pengaduan layak ditindaklanjuti minimal harus memenuhi kriteria 3W (*What, Where, When*). Pertimbangan profesional dimaksud adalah pendapat penelaah yang didasarkan pada data empiris kasus sejenis dan/atau berdasarkan informasi lain yang mendukung laporan/pengaduan tersebut.

## B. Mekanisme Penyampaian Laporan Pengaduan

Laporan secara langsung dapat dilakukan oleh *whistleblower* dengan menyampaikan kepada Tim Penerima Pengaduan atau pejabat/pegawai pada Inspektorat yang ditugaskan menangani pengaduan (*Whistleblowing System*) dengan membawa data-data laporan pengaduan.

Laporan secara tidak langsung melalui Saluran Pengaduan dapat dilakukan oleh *Whistleblower* dengan:

1. Memasukan data-data laporan pengaduan ke kotak pengaduan yang ada di Inspektorat; atau
2. Melalui *website* yang ditetapkan dalam keputusan Walikota dengan disertai *upload* data-data laporan pengaduan.

### C. Penanganan Pelaporan Pengaduan

Pengaduan Tindak Pidana Korupsi selanjutnya ditindaklanjuti oleh Tim Penerima Pengaduan, dengan mekanisme sebagai berikut:

#### 1. Pencatatan

Pencatatan pengaduan atas pelanggaran yang disampaikan Pelapor dilakukan sebagai berikut:

- a. Laporan pengaduan yang disampaikan baik secara langsung ataupun melalui Saluran Pengaduan dicatat oleh petugas di Inspektorat.
- b. Terhadap laporan pengaduan yang disampaikan secara lisan, oleh petugas dibuat secara verbal dan dimintakan bukti-bukti pendukung yang memadai.
- c. Pencatatan laporan pengaduan sekurang-kurangnya memuat informasi sebagai berikut:

##### 1) Data surat pengaduan/laporan, yang terdiri dari :

- a) Nomor dan tanggal agenda
- b) Tanggal surat pengaduan
- c) Perihal

##### 2) Identitas Pelapor

- a) Pelapor yang bersumber dari masyarakat, terdiri dari :

- (1) Nama
- (2) Nomor Induk Kependudukan (NIK)
- (3) Alamat
- (4) Pekerjaan
- (5) Kota
- (6) Provinsi

- b) Pelapor dari Pegawai di Lingkungan Pemerintah Daerah, terdiri dari :

- (1) Nama
- (2) Nomor Induk Pegawai (NIP)
- (3) Alamat
- (4) Jabatan

##### 3) Identitas terlapor, terdiri dari :

- a) Nama
- b) Nomor Induk Pegawai (NIP)
- c) Alamat
- d) Jabatan
- e) Satuan Kerja/Unit Kerja

## 2. Penelaahan

- a. Pengaduan/laporan yang telah dicatat kemudian ditelaah guna mengidentifikasi permasalahan/informasi dan merumuskan langkah-langkah penanganan selanjutnya.
- b. Penelaahan minimal yang dilakukan sebagai berikut:
  - 1) Merumuskan pokok permasalahan.
  - 2) Meneliti kelengkapan dokumen Bukti Permulaan.
  - 3) Mengumpulkan dan melengkapi data sebagai informasi pendukung.
  - 4) Melakukan analisis berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - 5) Menyimpulkan hasil penelaahan dan memutuskan penanganan selanjutnya.
- c. Hasil penelaahan pengaduan dan rekomendasi:
  - 1) Pengaduan yang substansinya tidak logis tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tidak mungkin dipenuhi dan tidak perlu diproses lebih lanjut.
  - 2) Pelaporan yang substansinya adanya dugaan Tindak Pidana Korupsi dilanjutkan dengan audit investigasi.
- d. Dalam hal hasil telaah yang hanya memenuhi kriteria 3W (*What, Where, When*) dan *Whistleblower* diketahui dengan jelas nama dan alamatnya serta dapat dihubungi, maka diupayakan mengundang *Whistleblower* untuk memperoleh tambahan informasi sebelum diterbitkannya Surat Tugas.

## 3. Pengarsipan

Berkas penanganan pengaduan dugaan adanya Tindak Pidana Korupsi yang disampaikan *Whistleblower* disimpan di tempat yang aman berdasarkan klasifikasi jenis masalah, satuan kerja/unit kerja terlapor serta urutan tanggal pengaduan sesuai dengan tatacara pengarsipan yang berlaku, dan arsip-arsip pengaduan tersebut bersifat rahasia. Terhadap permintaan informasi oleh pihak lain seperti Lembaga Swadaya Masyarakat, media massa dan lain-lain, dapat diberikan setelah mendapat persetujuan Walikota.

## 4. Audit Investigasi

Pengaduan yang disampaikan oleh Pelapor (*Whistleblower*) dan mengindikasikan adanya Tindak Pidana Korupsi ditindaklanjuti melalui audit investigasi.

## 5. Rekomendasi

Rekomendasi hasil Audit Investigasi atas laporan pengaduan dugaan Tindak Pidana Korupsi dapat berupa:

- a. Penjatuhan hukuman disiplin
  - 1) Rekomendasi berupa penjatuhan hukuman disiplin wajib disampaikan kepada Pejabat yang berwenang menjatuhkan hukuman disiplin.

- 2) Pejabat yang berwenang menjatuhkan hukuman disiplin wajib melaksanakan rekomendasi hasil pemeriksaan paling lambat 2 (dua) bulan sejak diterimanya rekomendasi hasil pemeriksaan tersebut.
  - 3) Pejabat yang berwenang menjatuhkan hukuman disiplin wajib menyampaikan tembusan Keputusan tentang penjatuhan hukuman disiplin kepada Inspektur.
- b. Pengembalian kerugian Negara/Daerah
- Rekomendasi berupa pengembalian kerugian daerah wajib disampaikan kepada Pejabat yang berwenang menindaklanjuti.
- c. Penyampaian hasil pemeriksaan :
- 1) Terhadap rekomendasi berupa penyampaian hasil pemeriksaan kepada Aparat Penegak Hukum dilakukan dalam hal hasil pemeriksaan berindikasi Tindak Pidana Korupsi dengan kerugian Negara kurang dari Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
  - 2) Terhadap rekomendasi berupa penyampaian hasil pemeriksaan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi dilakukan dalam hal hasil pemeriksaan berindikasi Tindak Pidana Korupsi dengan kerugian negara minimal sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
6. Pelimpahan Penanganan Kasus Tindakan Pidana Korupsi (TPK) kepada Penegak Hukum
- Pelimpahan penanganan kasus pengaduan Tindak Pidana Korupsi kepada Penegak Hukum dilakukan berdasarkan pertimbangan Walikota. Pertimbangan tersebut didasarkan pada kecukupan bukti-bukti tentang indikasi penyimpangan yang dilaporkan atau berdasarkan hasil pendalaman Audit Investigasi oleh Inspektorat, terindikasi kuat adanya suatu penyimpangan Tindak Pidana Korupsi.

### BAB III

#### PERLINDUNGAN DAN PENGHARGAAN TERHADAP PELAPOR PENGADUAN (*WHISTLEBLOWER*) DUGAAN TINDAK PIDANA KORUPSI

##### A. Perlindungan Terhadap Pelapor

Pemerintah Daerah khususnya Tim Penerima Pengaduan wajib melindungi dan menjaga kerahasiaan identitas Pelapor (*Whistleblower*), memberikan perlindungan hukum dan perlakuan wajar kepada Pelapor dengan berkoordinasi dengan pihak terkait/instansi yang berwenang. Inspektorat dapat mengungkapkan identitas Pelapor (*Whistleblower*) untuk keperluan penyidikan dan persidangan.

Untuk laporan yang disampaikan melalui Saluran Pengaduan agar kerahasiaan lebih terjaga dilakukan hal sebagai berikut:

1. Membuat nama samaran dan kata sandi yang hanya diketahui oleh Pelapor.
2. Menggunakan nama/identitas yang unik dan tidak menggambarkan identitas Pelapor.
3. Mencatat dan menyimpan dengan baik nama samaran dan kata sandi.
4. Tidak memberitahukan/mengisikan data-data pribadi, seperti nama Pelapor, atau hubungan Pelapor dengan pelaku pelanggaran yang dilaporkan.
5. Tidak memberitahukan/mengisikan data-data/informasi yang memungkinkan bagi orang lain untuk melakukan pelacakan siapa Pelapor.
6. Hindari orang lain mengetahui nama samaran (*user name*), kata sandi (*password*) serta nomor registrasi Pelapor.

Upaya lain yang bisa dilakukan untuk menjaga kerahasiaan identitas Pelapor adalah dengan melakukan pengarsipan berkas penanganan laporan pengaduan dugaan Tindak Pidana Korupsi dengan baik, berkas disimpan di tempat yang aman berdasarkan klasifikasi jenis masalah, instansi/unit kerja terlapor serta urutan waktu pengaduan sesuai dengan tata cara pengarsipan yang berlaku.

Sedangkan upaya perlindungan bagi Pelapor yang mengalami ancaman keselamatan jiwa, Inspektorat wajib berkordinasi dengan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).

#### B. Penghargaan Terhadap Pelapor

Setiap pejabat/pegawai, Organisasi Masyarakat, Lembaga Swadaya Masyarakat yang telah berjasa dalam usaha membantu upaya pencegahan atau pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mendapat penghargaan. Penghargaan dapat berupa piagam penghargaan atau bentuk lainnya sesuai dengan kebijakan Walikota dan ditetapkan dalam Keputusan Walikota.

#### C. Sanksi dan Pemulihan Nama Baik

Setiap pejabat yang terbukti menyalahgunakan jabatan/wewenang terhadap Pelapor atas Pelaporan dugaan korupsi yang disampaikan Pelapor, dapat diberikan sanksi atas perbuatannya tersebut.

Sebaliknya bila pejabat/pegawai yang dilaporkan terkait dugaan Tindak Pidana Korupsi dan tidak terbukti melakukan kesalahan atau melanggar hukum, berhak mendapatkan pemulihan nama baiknya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.



BAB IV  
PELAPORAN DAN PEMANTAUAN

A. Pelaporan

Tim Penerima Pengaduan melaporkan penanganan laporan pengaduan dugaan Tindak Pidana Korupsi secara berkala kepada Walikota.

Kewenangan untuk mempublikasikan penanganan laporan dugaan Tindak Pidana Korupsi berada pada Walikota. Informasi yang dapat dipublikasikan hanya terkait status dan statistik penanganan, dengan mempertimbangkan asas praduga tidak bersalah. Dalam hal *Whistleblower* meminta penjelasan mengenai perkembangan tindak lanjut atas laporan yang disampaikan, Tim Penerima Pengaduan atau petugas pada Inspektorat wajib menginformasikan status penanganannya dengan memberi penjelasan mengenai hal dimaksud kepada Pelapor (*Whistleblower*) tersebut.

Berdasarkan keputusan/persetujuan Walikota, apabila dari hasil audit ditemukan penyimpangan yang mengandung unsur Tindak Pidana Korupsi, laporan disampaikan kepada :

1. Instansi penyidik (kejaksaan/kepolisian) atau Komisi Pemberantasan Korupsi yang akan digunakan sebagai informasi/bahan penanganan lebih lanjut.
2. Atasan langsung dari pejabat/pegawai yang diaudit atau pejabat yang berwenang yang akan menindaklanjuti rekomendasi yang tercantum dalam laporan.

Apabila dari hasil audit ditemukan penyimpangan yang memerlukan tindak lanjut, tetapi tidak memenuhi unsur Tindak Pidana Korupsi, maka laporan hasil audit tidak perlu disampaikan kepada instansi penyidik atau Komisi Pemberantasan Korupsi.

B. Pemantauan Hasil Penanganan Laporan Pengaduan

Pemantauan hasil penanganan laporan pengaduan dugaan Tindak Pidana Korupsi dilakukan oleh Inspektorat baik secara langsung melalui pemutakhiran data, rapat koordinasi, monitoring oleh pejabat yang menangani, atau pemantauan secara tidak langsung melalui komunikasi elektronik dan melalui surat.

Pemantauan penanganan pengaduan dugaan Tindak Pidana Korupsi dikelompokkan menjadi status dalam proses dan status selesai. Status selesai apabila Inspektorat telah menerbitkan laporan.

WALIKOTA PASURUAN,



SAIFULLAH YUSUF